

Pemberitaan “Political Will” Wujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta Pada Kompas.id

Inda Farahainnisa, Muharom, Dwi Fitria Ningsih, Wulandari Putri, Nazwa Al Ghany

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Strata 1 Ilmu Komunikasi

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 27, 2025

Revised April 09, 2025

Accepted April 15, 2025

Available online April 16, 2025

Keywords:

News, Political will, public transportation, Jakarta, Kompas.id

Keywords:

Pemberitaan, Political will, transportasi umum, Jakarta, Kompas.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The article “Political Will Realizes the Reliability of Jakarta’s Public Transportation” from Kompas.id has provided basic information. The issue of public transportation discussed is indeed centered on the city of Jakarta, a metropolitan city that is always busy and has high traffic volume and high congestion, even ranking as the 7th most congested city in the world. Another problem is that Jakarta is not a single city that stands alone, this city is supported by several other supporting cities such as Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. The cities above also depend on public transportation in Jakarta which is usually where their people work, therefore the solution offered by Pramono Anung and Rano Karno must be comprehensive and not only fair to certain areas. This issue is very important to discuss because according to Tempo, there are 22.4 million vehicles passing through Jakarta in 2022. In addition to causing endless congestion, the large number of motor vehicles also causes other problems such as poor environmental and air quality in Jakarta. Therefore, the program that will be launched by Pramono Anung and Rano Karno later must be a breakthrough in reform in the world of public transportation in Jakarta, not just a

political promise for image.

ABSTRACT

Artikel “Political Will Mewujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta” dari Kompas.id sudah memberikan informasi dasar. Isu transportasi umum yang dibahas memang berpusat di kota Jakarta, kota megapolitan yang selalu sibuk dan memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan kemacetan yang tinggi bahkan menduduki kota termacet ke-7 di dunia. Masalah lain adalah Jakarta bukanlah kota tunggal yang berdiri sendirian, kota ini ditopang oleh beberapa kota penyangga lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Kota-kota di atas juga bergantung pada transportasi umum di Jakarta yang biasanya menjadi tempat masyarakatnya bekerja, maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya adil bagi kawasan tertentu. Isu ini sangat penting untuk dibahas karena menurut Tempo, ada sebanyak 22,4 juta kendaraan yang melintas di Jakarta per tahun 2022. Selain menyebabkan kemacetan yang tak ada ujungnya, banyaknya kendaraan motor juga menimbulkan masalah lain seperti buruknya kualitas lingkungan dan udara di Jakarta. Maka dari itu program yang akan dicanangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno nantinya haruslah menjadi suatu gebrakan reformasi dalam dunia transportasi umum di Jakarta, bukan hanya sekedar janji politik untuk pencitraan.

PENDAHULUAN

Berita yang bertajuk “Political Will Wujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta” yang dimuat oleh portal berita Kompas menyoroti bagaimana pentingnya unsur kemauan politik atau yang biasa disebut “political will” dalam menciptakan suatu sistem transportasi umum yang dapat digunakan dengan baik dan bisa berkelanjutan. Inti bahasan dari berita tersebut adalah mengulas bagaimana janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Mereka berjanji jika mereka terpilih, maka 15 kelompok rentan akan mendapatkan pelayanan transportasi umum secara cuma-cuma serta memperluas rute dari pelayanan transportasi umum warga Jakarta. Janji ini telah berhasil menggeser suatu stigma bahwa *political will* kali ini cenderung berorientasi pada pemanfaatan dan perbaikan transportasi umum yang sudah ada, bukan lagi menggiatkan penggunaan kendaraan pribadi.

Pramono Anung dan Rano Karno awalnya sangat diragukan akan berhasil membuat program ini menjadi kenyataan. Pihak-pihak tertentu skeptis terhadap dua pasangan ini karena memang pada awalnya kedua pasangan calon ini juga tidak “dijagokan” dalam pagelaran pilkada tempo hari. Suara-suara tersebut muncul dari beberapa tokoh misalnya saja Budi Susandi dari Institut Studi Transportasi (Instran) dan Yusa Cahya Permana dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Tokoh-tokoh tersebut mengemukakan

*Corresponding author

Email : indafarahainnisa@gmail.com, muharom0903@gmail.com, dwifitriaa57@gmail.com, wulandari.putri1001@gmail.com, nazwalghany27@gmail.com

pendapatnya bahwa keberhasilan suatu sistem transportasi umum khususnya di Jakarta sangat bergantung pada keberanian pemimpinnya untuk berani membangun ekosistem transportasi umum yang adil bagi seluruh masyarakat Jakarta.

Isu transportasi umum yang dibahas memang berpusat di kota Jakarta, kota megapolitan yang selalu sibuk dan memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan kemacetan yang tinggi bahkan menduduki kota termacet ke-7 di dunia. Masalah lain adalah Jakarta bukanlah kota tunggal yang berdiri sendirian, kota ini ditopang oleh beberapa kota penyangga lain seperti Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi. Kota-kota di atas juga bergantung pada transportasi umum di Jakarta yang biasanya menjadi tempat masyarakatnya bekerja, maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya adil bagi kawasan tertentu.

Program ini nantinya akan dikerjakan pada 100 hari pertama Pramono Anung dan Rano Karno menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Meskipun terkesan sangat terburu-buru, para ahli transportasi telah mengingatkan mereka bahwasanya pekerjaan dalam membentuk sistem transportasi umum yang baik dan berkelanjutan. Mereka juga mengkritisi, program jangka pendek apalagi hanya 100 hari merupakan hal yang mustahil dalam menciptakan sistem tadi. Kalaupun dipaksakan untuk dikebut dalam 100 hari, para ahli memperingati Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih itu untuk menjadikan program tersebut hanya sebatas pondasi untuk program jangka panjang selanjutnya.

Isu ini sangat penting untuk dibahas karena menurut Tempo, ada sebanyak 22,4 juta kendaraan yang melintas di Jakarta per tahun 2022. Selain menyebabkan kemacetan yang tak ada ujungnya, banyaknya kendaraan motor juga menimbulkan masalah lain seperti buruknya kualitas lingkungan dan udara di Jakarta. Maka dari itu program yang akan dicanangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno nantinya haruslah menjadi suatu gebrakan reformasi dalam dunia transportasi umum di Jakarta, bukan hanya sekedar janji politik untuk pencitraan.

Para ahli transportasi telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta tersebut untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tambahan misalnya tarif parkir progresif, pembatasan kendaraan pribadi, hingga jalan berbayar elektronik.

KAJIAN TEORITIS

Karakteristik dan Ideologi Media

Sebagai salah satu situs pemberitaan online terkemuka di Indonesia, Kompas.id memiliki karakteristik pemberitaan yang faktual dan berbasis data. Terlebih pada artikel bertajuk "*Political Will*" Wujudkan Keandalan Transportasi Jakarta, Kompas.id mengangkat isu terkait pentingnya integrasi dan pengembangan transportasi umum di Jakarta dengan menyajikan statistik data yang relevan, seperti jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2024 yang menunjukkan ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dan lambatnya perkembangan transportasi umum yang terintegrasi. Selain itu, artikel juga bersifat objektif dan analitis dengan mengutip berbagai sudut pandang dari berbagai pihak, termasuk ahli transportasi Budi Susandi dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarif Liputo. Artikel ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang lebih jelas, pendanaan yang memadai, dan perbaikan sumber daya manusia serta infrastruktur untuk mendukung sistem transportasi yang lebih efektif.

Jika dilihat dari sisi ideologi media, Kompas.id jelas menunjukkan dukungan pada pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan menekankan pada kebijakan transportasi yang efisien dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Artikel ini juga mengkritisi kebijakan yang dianggap belum berpihak pada transportasi umum, seperti subsidi bahan bakar yang mendukung kendaraan pribadi, tarif parkir yang murah di pusat kota, serta belum diterapkannya ERP (*electronic road pricing*) secara optimal. Penegakan regulasi tersebut perlu diimbangi dengan tata ruang dan tata kota aglomerasi untuk menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan. Selain itu, Kompas.id menyoroti harapan agar integrasi informasi dan sistem pembayaran dibuat lebih mudah dan melibatkan masyarakat agar menciptakan standarisasi yang sesuai.

Disamping kritik terkait pembangunan yang berkelanjutan, Kompas.id turut mendorong pembaca untuk mengetahui pentingnya integrasi transportasi umum dan mendukung kebijakan yang lebih berpihak sebagai solusi panjang kemacetan dan polusi udara yang ada di Jakarta. Melalui pendekatan ini, dapat tergambar jelas bahwa ideologi Kompas.id berfokus pada keberlanjutan sosial dan lingkungan, dengan harapan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup warga Kota Jakarta melalui kebijakan yang lebih inklusif.

Sasaran SDGs Pemberitaan

Adapun dalam konteks SDG, artikel yang dimuat dalam Kompas.id ini berkaitan erat dengan SDG 11, yaitu: "Kota dan Pemukiman yang Inklusif, Aman, Tahan Bencana, dan Berkelanjutan". Tujuan utama dari SDG 11 adalah menciptakan kota-kota yang lebih ramah bagi semua lapisan, berkelanjutan, dan aman, dimana setiap individu memiliki akses yang sama terhadap fasilitas dan layanan yang dapat meningkatkan

taraf hidup mereka. Salah satu aspek dasar dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan adalah sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, serta ramah lingkungan.

Target SDG 11 yang paling relevan dengan pembahasan dalam artikel adalah Target 11.2, yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas sistem transportasi umum untuk semua, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Integrasi transportasi umum di Kota Jakarta akan memberi kemudahan bagi masyarakat dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi dalam mengakses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas penting lainnya. Dengan demikian, Jakarta dapat memberikan kesempatan yang lebih setara bagi seluruharganya.

Target 11.6, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, juga dapat dikaitkan dengan artikel ini. Jakarta adalah salah satu kota dengan tingkat polusi yang parah, hal ini akibat kemacetan dari banyaknya kendaraan pribadi di jalan. Integrasi sistem transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, Jaklingko, LRT, dan bus listrik akan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi dan beralih pada transportasi umum. Hal ini tentu akan berdampak positif dengan meningkatkan kualitas udara serta kesehatan masyarakat.

Tak hanya kedua target di atas, target 11.7 yang menekankan pada pentingnya menciptakan ruang publik yang aman dan inklusif bagi semua orang, juga sangat relevan. Dalam sistem transportasi yang terintegrasi, keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup kebutuhan transportasi untuk penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Dengan sistem transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan, Jakarta dapat berkontribusi pada pencapaian SDGs 11 dan menciptakan kota yang lebih hijau, inklusif, serta layak huni bagi semuaarganya.

Fungsi Media dalam Pembangunan

Media memiliki peran penting dalam mengawal dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Terdapat artikel menarik yang membahas peran media dalam konteks ini adalah tulisan dari Kompas.id berjudul "Political Will Wujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta".

Pada proses pembangunan, media berfungsi sebagai jembatan untuk menyebarkan informasi penting mengenai kebijakan, inovasi, serta praktik di berbagai bidang seperti kota dan permukiman berkelanjutan, dan lainnya secara objektif kepada masyarakat luas. Artikel Kompas.id tersebut secara jelas menginformasikan kepada publik mengenai program prioritas untuk 100 hari pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Pramono Anung-Rano Karno terkait transportasi umum. Media memberikan informasi detail mengenai program-program utama, seperti penyediaan transportasi gratis bagi 15 golongan dan upaya untuk memperluas pelayanan. Dengan informasi yang tepat dan menyeluruh, masyarakat dapat mengevaluasi, memantau, dan terlibat dalam proses pembangunan transportasi.

Selain itu, media berfungsi sebagai penggerak partisipasi publik serta mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Media memberikan *platform* bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Media membantu mengangkat aspirasi sehingga masyarakat dapat lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan. Seperti pada artikel Kompas.id yang berjudul "Political Will Wujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta" ini menyajikan berbagai perspektif, pandangan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ).

Terakhir, media berfungsi sebagai pengawas dan pendorong transparansi. Media mengawasi kebijakan pemerintah dan mengungkap praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada artikel "Political Will Wujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta", media tidak hanya menyampaikan janji-janji manis, tetapi juga menyoroti tantangan yang ada. Pernyataan dari Ketua Intran, Budi Susandi, menekankan perlunya kemauan politik untuk mewujudkan transportasi umum yang optimal. Dalam konteks ini, media melaporkan isu kritis, seperti ketimpangan antara pertumbuhan kendaraan pribadi dan transportasi umum, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung transportasi publik. Fungsi pengawasan ini penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dan mendorong perbaikan sistem transportasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Model yang Digunakan

Smart City:

Menurut Izzuddin (2022), Smart City adalah model pengembangan kota dengan memanfaatkan dan mengimplementasikan kecanggihan sistem teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial di suatu wilayah dengan tujuan meningkatkan pelayanan serta mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.

Sedangkan, menurut Wicaksana (2020), *Smart City* secara konseptual merupakan kota yang inovatif dan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi, untuk menciptakan lingkungan atau kota yang nyaman dan berkelanjutan. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, istilah '*smart*' lebih mengarah pada ketepatan, namun tidak hanya berfokus pada teknologi semata (Margaretha et al., 2023).

Teknologi dalam hal ini hanya menjadi suatu pendukung demi mewujudkan kota pintar. (Giffinger & Haindl, 2009) Terdapat enam indikator atau komponen yang mengukur keberhasilan kota pintar, yaitu: a) *Smart Living* (Kehidupan pintar), b) *Smart Environment* (lingkungan pintar), c) *Smart Utility* (utilitas pintar), d) *Smart Economy* (ekonomi pintar), d) *Smart Economy* (ekonomi pintar), e) *Smart Mobility* (mobilitas pintar), dan f) *Smart People* (masyarakat pintar). Berikut dimensi serta faktor dan karakteristiknya dapat dilihat pada gambar 1. dibawah ini

SMART ECONOMY (Competitiveness) ▪ Innovative spirit ▪ Entrepreneurship ▪ Economic image & trademarks ▪ Productivity ▪ Flexibility of labour market ▪ International embeddedness ▪ Ability to transform	SMART PEOPLE (Social and Human Capital) ▪ Level of qualification ▪ Affinity to life long learning ▪ Social and ethnic plurality ▪ Flexibility ▪ Creativity ▪ Cosmopolitanism/Open-mindedness ▪ Participation in public life
SMART GOVERNANCE (Participation) ▪ Participation in decision-making ▪ Public and social services ▪ Transparent governance ▪ Political strategies & perspectives	SMART MOBILITY (Transport and ICT) ▪ Local accessibility ▪ (Inter-)national accessibility ▪ Availability of ICT-infrastructure ▪ Sustainable, innovative and safe transport systems
SMART ENVIRONMENT (Natural resources) ▪ Attractivity of natural conditions ▪ Pollution ▪ Environmental protection ▪ Sustainable resource management	SMART LIVING (Quality of life) ▪ Cultural facilities ▪ Health conditions ▪ Individual safety ▪ Housing quality ▪ Education facilities ▪ Touristic attractiveness ▪ Social cohesion

Gambar 1. List of characteristics and factors (Giffinger and Haindl 2009)

Smart Mobility

Berdasarkan enam indikator atau komponen yang mengukur keberhasilan kota pintar tersebut, Smart Mobility sebagai salah satunya memiliki peran besar dalam mewujudkan kota yang efisien, aman, dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan sistem transportasi publik agar terintegrasi satu sama lain untuk mendukung seluruh mobilitas warga DKI Jakarta (Young et al., 2025). Dengan mengutamakan Smart Mobility, pembangunan infrastruktur perkotaan akan mengarah pada integrasi dan berorientasi pada sistem untuk memastikan kompatibilitas dengan kepentingan publik (Margaretha et al., 2023).

Saat ini, beberapa contoh produk Smart Mobility yang sudah mulai diterapkan di DKI Jakarta yaitu Transit Oriented Development (TOD), Bus Listrik Transjakarta, Revitalisasi Halte Transjakarta dan Sistem Pembayaran Terintegrasi JakLingko. Keempat produk ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dengan mengurangi waktu tempuh perjalanan, mengurangi kemacetan, dan memperluas aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau transportasi umum. Dengan inovasi-inovasi ini, Jakarta berupaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan kota yang lebih layak huni dan nyaman bagi warganya.

Fungsi Pemberitaan terhadap Pembangunan

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan, terutama dalam sektor transportasi dan aksesibilitas. Salah satu fungsi utama media adalah fungsi pemberitaan, yaitu menyampaikan informasi faktual dan aktual kepada publik. Berkaitan dengan konteks pembangunan, fungsi ini dapat memperkuat partisipasi publik, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta mempengaruhi arah kebijakan.

Fungsi pemberitaan dalam media massa berfokus pada penyampaian informasi yang berhubungan dengan kebijakan, program, dan realisasi pembangunan. Dalam konteks transportasi, pemberitaan memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Media dapat menginformasikan capaian pembangunan, mengkritisi kebijakan yang tidak efektif, serta mengangkat suara kelompok rentan yang terdampak oleh sistem transportasi yang belum inklusif.

Menurut McCombs dan Shaw (1972) dalam teori *agenda setting*, media tidak hanya memberitakan, tetapi juga menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik. Artinya, ketika media secara aktif memberitakan tentang integrasi transportasi, maka isu tersebut akan menjadi perhatian bersama. Sementara itu, Jan Servaes (2022) menekankan bahwa media memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan. Media yang menyuarakan ketimpangan akses atau mempromosikan solusi dapat mempercepat perubahan kebijakan.

Seperti halnya pemberitaan bertajuk "*Political Will* Mewujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta" yang dimuat oleh Kompas.id, secara jelas menunjukkan bagaimana media berperan dalam mendukung pembangunan transportasi yang terintegrasi. Pemberitaan tersebut menyoroti lemahnya *political will* pemerintah dalam mengelola sistem transportasi Jakarta yang masih terfragmentasi antara berbagai operator dan institusi. Melalui pemberitaan ini, publik diajak untuk memahami bahwa integrasi transportasi tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal koordinasi kebijakan antar lembaga.

Selain itu, artikel pemberitaan tersebut juga berfungsi sebagai alat edukasi bagi masyarakat untuk memahami pentingnya keberlanjutan dan keandalan sistem transportasi. Dengan mengangkat fakta dan pendapat ahli, artikel ini mendorong pembaca untuk mengkritik kebijakan yang ada sekaligus menuntut perbaikan sistem. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunawan (2021) yang menyatakan bahwa pemberitaan yang berkualitas dapat meningkatkan literasi publik dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa fungsi pemberitaan terhadap pembangunan dalam konteks integrasi transportasi dan aksesibilitas adalah bersifat mendukung. Pemberitaan yang objektif, tidak hanya sekadar menjadi pelengkap informasi, melainkan juga menjadi alat strategis yang mampu mengarahkan jalannya pembangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berfokus pada kepentingan publik.

Fungsi pemberitaan yang mengedukasi masyarakat tentang kebijakan transportasi, mengkritisi implementasi kebijakan, serta memberi ruang bagi kelompok rentan untuk bersuara, sejatinya sejalan dengan konsep *Smart City* yang menekankan pentingnya integrasi antara infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi dengan dukungan teknologi secara efisien dan inklusif. Dalam konteks *Smart Mobility*, media memiliki kontribusi krusial dalam memastikan bahwa sistem transportasi terintegrasi tidak hanya dibangun secara teknis, tetapi juga didukung oleh komunikasi yang transparan serta keterlibatan aktif masyarakat.

Seiring dengan itu, fungsi pemberitaan juga memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini kurang terdengar, seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk memperoleh representasi yang lebih adil dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan pandangan Melkote dan Steeves (2001) dalam *Communication for Development in the Third World*, yang menyatakan bahwa komunikasi pembangunan yang efektif harus bersifat partisipatif dan inklusif. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki akses terhadap ruang pengambilan keputusan, pemberitaan berperan sebagai jembatan untuk menyuarakan kebutuhan kelompok rentan kepada para pembuat kebijakan.

Dengan begitu, pembangunan kota pintar tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi semata, melainkan juga mencerminkan prinsip keterbukaan, keberlanjutan, dan responsivitas terhadap kebutuhan publik yang merupakan esensi dari konsep *Smart City* menurut Giffinger & Haindl (2009) dan Margaretha et al. (2023).

SIMPULAN

Media memiliki peran penting terutama dalam memberi informasi kepada publik, memperkuat partisipasi publik dan mendukung transparansi dalam proses pembangunan, serta memastikan suara masyarakat terdengar. Artikel dari Kompas.id menjelaskan pentingnya integrasi transportasi umum di Jakarta dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagai media, Kompas.id telah memberi informasi penting kepada masyarakat luas dengan menyajikan data terkini dan analisis objektif serta sudut pandang dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta dan Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ), serta menyertakan kritik terhadap kebijakan saat ini.

Sebagai simpulan, artikel "*Political Will* Mewujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta" dari Kompas.id sudah memberikan informasi dasar, namun dapat ditingkatkan dengan menambahkan perspektif dari pengguna transportasi umum secara lebih mendalam. Saran untuk pemberitaan ideal kedepannya adalah dengan memperbanyak data kuantitatif mengenai dampak nyata terhadap peningkatan

transportasi umum terhadap pengurangan kemacetan, peningkatan kualitas udara, dan perubahan perilaku masyarakat.

Jika kami menjadi penulis artikel ini, kami akan mewawancarai penumpang transportasi umum secara acak untuk mendapatkan cerita mereka sebagai rakyat tentang bagaimana transportasi umum mengubah hidup mereka, baik dari segi ekonomi, dan waktu. Selain mendapatkan cerita, diperlukan juga untuk meminta pendapat dan saran dari masyarakat mengenai integrasi transportasi umum di Jakarta sebagai program pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, kami akan menyertakan perspektif dari pakar atau pengamat transportasi dan tata kota mengenai langkah konkret yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas transportasi umum. Dengan begitu, maka media dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai media, yaitu dengan membentuk opini publik. Opini ini kemudian bisa mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat, sehingga mereka menilai isu tersebut sebagai prioritas.

REFERENSI

- Ansori, A.N.A. (2025) Keterbatasan Akses di DKI, Bikin Penyandang disabilitas Sulit Berperan aktif, liputan6.com. Available at: <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5942167/keterbatasan-akses-di-dki-bikin-penyandang-disabilitas-sulit-berperan-aktif> (Accessed: 20 April 2025).
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Giffinger, R., & Gudrun, H. (2010). Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of the cities?. *ACE: architecture, city and environment*, 4(12), 7-26.
- Hendra, T. (2019, Juni 2). Media Massa Dalam Komunikasi Pembangunan. *Jurnal At-Taghyir*, 1(2).
- Izzuddin, F. N. (2022). Konsep smart city dalam pembangunan berkelanjutan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3), 376-382.
- Kompas.id. (2024). Political Will Mewujudkan Keandalan Transportasi Umum Jakarta. Diakses dari: <https://www.kompas.id/artikel/political-will-mewujudkan-keandalan-transportasi-umum-jakarta>
- Litman, T. (2021). *Evaluating accessibility for transportation planning: Measuring people's ability to reach desired goods and activities* (Report). Victoria Transport Policy Institute. <https://www.vtpi.org/access.pdf>
- Mahrani, S., Pasi, I. D., Mutmainnah, A. K., Samosir, S. W. P., & Gunawan, I. (2021). Proses Pembangunan Smart City Di Indonesia Menggunakan Metode Big Data Analytis Dalam Penerapan E-Commerce. *Media Jurnal Informatika*, 13(2), 57-6.
- Margaretha, A. M., & Nugroho, A. A. (2023). Transportasi Publik Terintegrasi: Optimalisasi Implementasi Smart Mobility di DKI Jakarta. *Journal Of Public Policy and Applied Administration*, 47-58.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (2023). *The agenda-setting function of mass media*. In *The Political Communication Reader* (pp. 170-175). Routledge.
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2001). *Communication for development in the third world: Theory and practice for empowerment* (2nd ed.). Sage Publications.
- RDK FM. Available at: <https://rdkfm.id/optimalikan-aksesibilitas-warga-pemprov-dki-jakarta-perkenalkan-program-transportasi-gratis/> (Accessed: 20 April 2025).
- Rosyid, A., Setiawan, M. I., Nasihien, R. D., Razi, M. A. M., Isradi, M., Muchayan, A., ... & Sukoco, A. (2021). Integrasi Transportasi Publik Dalam Mendukung Pembangunan Daerah. *eMobility/ Sustainable Mobility* Transportasi Publik dan Teknologi GIS mendukung peningkatan Pembangunan Daerah (Pertama, pp. 8-25). IPEST.
- Senda, T. J. S. (2023). Optimalisasi Fungsi Skywalk Kebayoran Lama dalam Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi Publik di Jakarta Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Servaes, J. (2022). Communication for development and social change. In *The Routledge handbook of nonprofit communication* (pp. 23-31). Routledge.
- Siebert, F. S., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). *Four theories of the press: The authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do*. University of Illinois Press.
- Upaya-Upaya jakarta inklusi disabilitas (no date) Jakarta Smart City. Available at: <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/upaya-upaya-jakarta-inklusi-disabilitas/> (Accessed: 20 April 2025).
- Young, C., Evelyn, F., & Nugraha, D. P. (2025). Implementasi Smart Mobility Sebagai Model Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 10-10.
- Ziliwu, C. I. J., Putra, R. K., Karuniawati, A., Ginting, E. S. J., Gustia, Z., & Raniasta, Y. S. (2024, April). EVALUASI AKSESIBILITAS DAN INTEGRASI KAWASAN PADA JARINGAN TRANSPORTASI PUBLIK BUS RAPID

TRANSIT DI YOGYAKARTA: Studi Kasus: Halte Trans Jogja SMP 5, Kotabaru. In SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi) (Vol. 7, pp. 17-30).